

POHON KINERJA KECAMATAN LUMAJANG TAHUN 2022



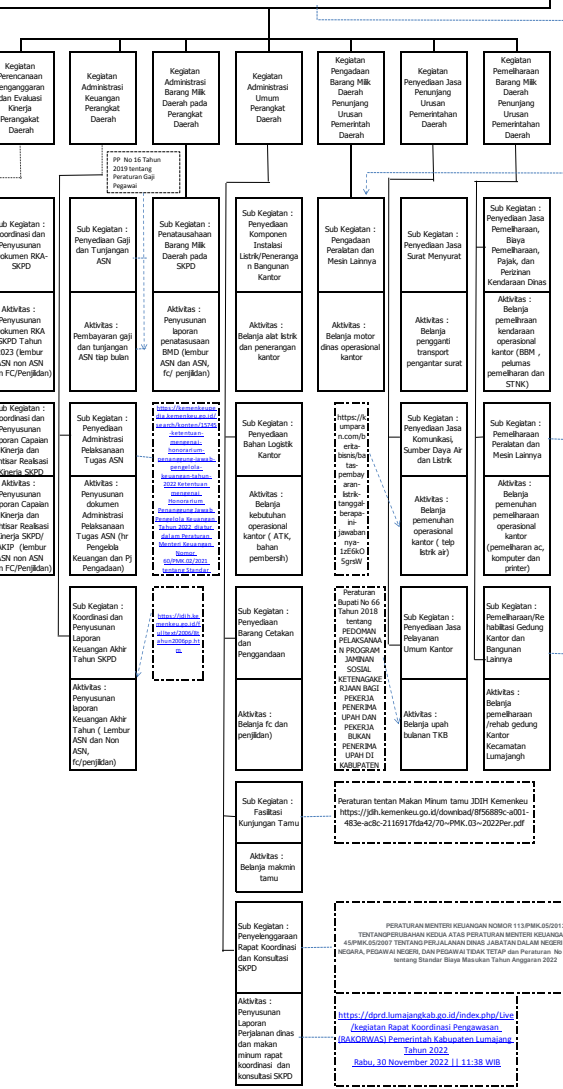
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indeks RB (PermenPAN-RB tahun 2014) Rendahnya nilai indeks RB Kabupaten Lumajang dengan nilai 56,56 (CC) dan berada di peringkat 36 dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur (Grafik Evaluasi Indeks RB)
Fenomena	

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	
Indikator	Nilai DOK (PermenPAN-RB 14 Tahun 2017) DOK Kecamatan Lumajang dan target 86,37, capaian Kecamatan Lumajang sebesar 87,31, namun demikian kenakarnya dari tahun 2019 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Tahun 2019 nilai DOK 87,16
Fenomena	

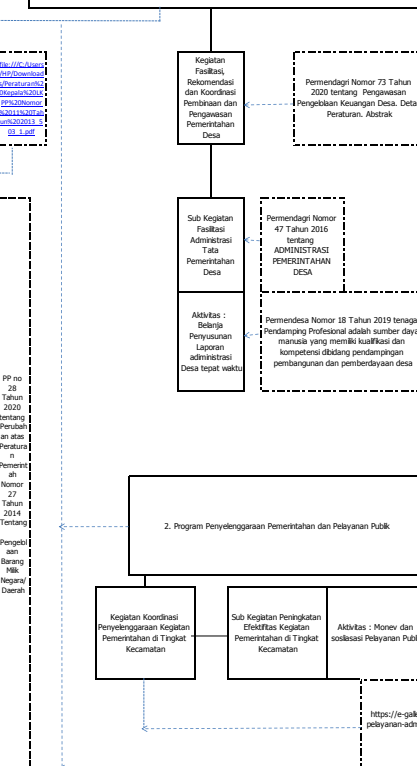
Menggigitkan Fasilitas dan koordinasi Kecamatan	
Indikator	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang diindikasikan (PP 43 Tahun 2014, dan PMDN 73 Tahun 2020)
Fenomena	Hasil evaluasi pemetaan aset pada kecamatan Lumajang sudah di atas target (dari target 51%, capaiannya sudah 100%), namun demikian target tiap tahun terus meningkat, yang artinya kecamatan Lumajang harus mempertahankan laga pemetaan aset indikator tersebut agar tetap sesuai sesuai target.

Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (PP 43 Tahun 2014, dan PMDN 73 Tahun 2020)
Fenomena	Nilai indikator tersebut di atas pada kecamatan Lumajang sudah di atas target (dari target 83%, capaiannya sudah 100%) namun demikian target tiap tahun terus meningkat, yang artinya kecamatan Lumajang harus mempertahankan laga persentase dari indikator tersebut agar tetap sesuai target.

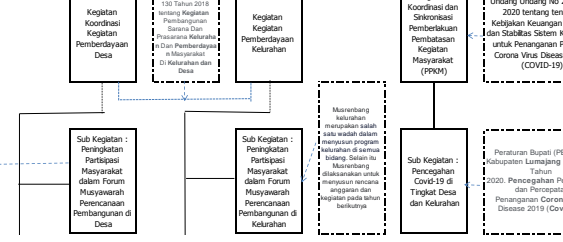
1. Program Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



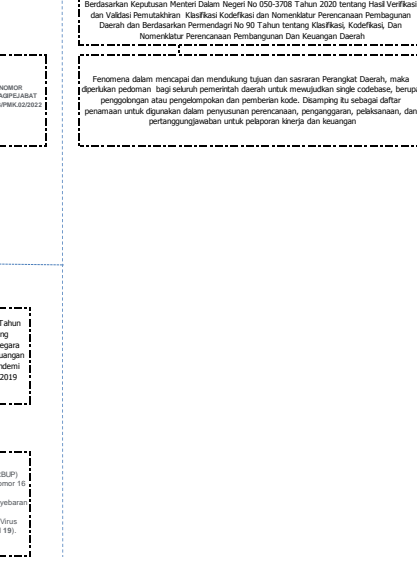
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



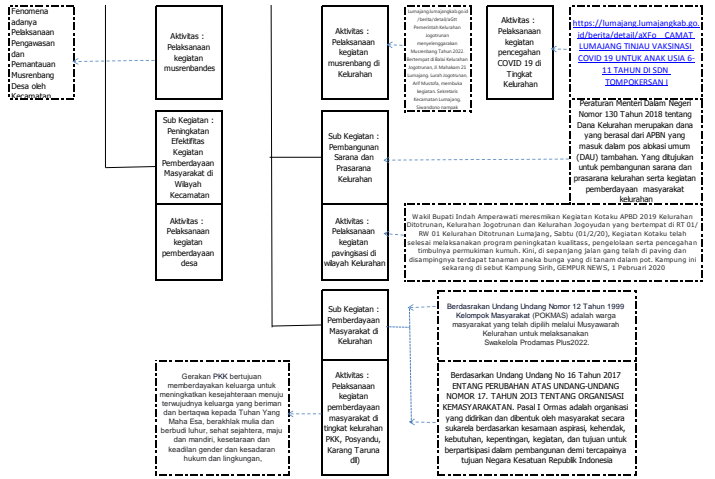
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



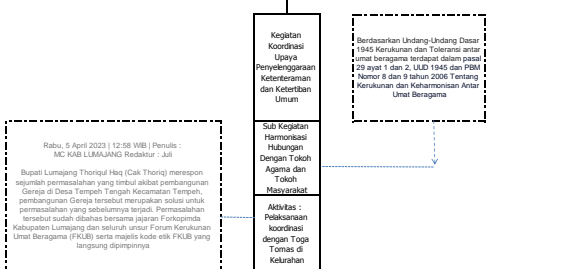
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik



Fenomena dalam mencapai dan mendukung tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, maka diperlukan pedoman bagi seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan single codexbase, berupa penggabungan atau pengelompokan dan pembeian kode. Disamping itu sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban untuk peporan kinerja dan keuangan.



4. Program Koordinasi Kelerbman dan Keterban Umum



5. Program Penyelenggaraan Usutan Pemerintahan Umum

